IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN TRIKORA DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA

SYAMSIER HUSEIN¹, NITA MAULINDA SARI²

 Manajemen, Universitas Yapis Papua email: syamsierhusein@yahoo.com
 Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua

email: maulinda.sari@gmail.com.com

ABSTRAK

Kajian tentang Implementasi Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura merupakan kajian deskriptif dengan instrument inti yang digunakan adalah wawancara dan teknik analisa data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data, dengan memfokuskan pada 3 fokus kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil musrenbang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses hasil musrenbang pada Bidang Sarana dan Prasarana Fisik diantaranya pengadaan meubel berupa meja kursi untuk pegawai, pengecatan pagar kantor kelurahan, pengecatan jalan, pemasangan papan nama ketua RT dan RW serta pemasangan batas wilayah antar RT dan RW; pada Bidang Sosial Budaya adalah pengadaan Alquran untuk masjid, Infokus untuk gereja dan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat, pada Bidang Ekonomi adalah bantuan modal usaha, bantuan sosial Dan pada Bidang Pemerintahan pendataan warga berbasis IT, penertiban administrasi dan penyelesaian sertifikasi kantor kelurahan.

Keluaran pelaksanaan program hasil musrenbang Bidang Sarana dan Prasarana fisik adalah upaya pencapaian standar pelayanan minimum bagi aparatur kelurahan, tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora. Bidang Sosial Budaya terciptanya kehidupan social budaya yang baik sesuai dengan kearifan local, kehidupan masyarakat yang rukun dan bertoleransi tinggi antar warga. Bidang Ekonomi terbentuknya masyarakat sejahtera, tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing. Bidang Pemerintahan tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparatur pemerintah kepada masyarakat, meningkatnya kinerja pegawai sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur, mewujudkan good government dan clean government.

Dampak dari pelaksanaan program hasil musrenbang bidang Sarana Prasarana Fisik tercapainya penataan kantor yang baik sebagai upaya peningkatan motivasi kerja pegawai, pemetaan wilayah yang baik dengan batas-batas wilayah yang jelas, dimana ketatalaksanaan pelayanan dapat sesuai dengan SOP yang ada serta alur birokrasi menjadi lebih jelas dengan penempatan sarana prasarana kerja yang baik. Bidang Sosial Budayaterciptanya kehidupan yang rukun antar warga serta tatanan kemasyarakatan yang teratur dan terbinanya generasi muda kearah yang lebih positif, mencerminkan suasana kehidupan yang harmonis antar warga. Bidang Ekonomi peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perwujudan masyarakat sejahtera, mandiri dan memiliki daya saing sehingga mampu berkompetisi dengan warga lainnya sesuai kemampuan masing-masing warga. Bidang Pemerintahan tercapaianya peningkatan tertib administrasi pada ketatalaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan dengan berbasis pada IT, peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan capaian indikator kinerjanya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, birokrasi yang baik dan koordinasi yang terarah dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musyawarah perencanaan pembangunan yang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat dan masyarakat memutuskan prioritas pembangunaan yang akan dilaksanakan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, yang mana usulan-usulan tersebut

dikategorisasikan berdasarkan bidang-bidang dan alokasi anggaran. Kelurahan Trikora merupakan kelurahan yang berada di wilayah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Pada musrenbang tahun 2020 kelurahan Trikora mengusulkan program kerja terdiri dari bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan, yang dihadiri kurang lebih seratus orang dari perwakilan masing-masing kelompok.

terjadi Adapun masalah yang dalam pembangunan di kelurahan Trikora yaitu tidak adanya komunikasi yang intens antara pihak perangkat daerah dengan pihak kelurahan mengenai realisasi program pembangunan yang dilakukan oleh pihak perangkat daerah sehingga pihak kelurahan tidak tahu program mana saja yang sudah dikerjakan dan adapun program yang dijalankan tidak sesuai dengan lokasi yang telah dibahas dalam rapat musrenbang sebelumnya hal itu menyebabkan usulan tersebut kembali diusulkan pada rapat musrenbang di tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik dan mencoba melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ?".

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut kamus Webster, seperti dikutip oleh Wahab (2008: 64) merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryng out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

B. Kerangka Konseptual Gambar 1 Kerangka Konseptual

Program Hasil Musrenbang

Implementasi

1. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

2. Bidang Sosial Budaya

3. Bidang Ekonomi

Implementasi

1. Proses

2. Keluaran

3. Dampak

Secara umum implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan cermat dan terperinci. Oleh karenanya implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya sehingga kepastian dari program yang dilaksanakan telah tersusun dengan baik.

2. Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian, dan Evaluasi Penyusunan, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Musrenbang telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersama dengan penerbitan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). dilaksanakan Musrenbang secara bertingkat dari tingkat desa, Kecamatan, SKPD dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 -2022 pada pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Kota Jayapura, TNI, POLRI, Kejaksaan

,Akademis,LSM/Ormas,tokoh masyarakat kota jayapura,pengusaha/investor,Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintahan Kampung,serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menelusuri unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami pemikiran mereka tentang dunia sekitarnya, (S. Nasution dalam Andi Prastowo, 2011: 359-360). Dengan desain penelitian adalah survey.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bidang-bidang yang merupakan usulan pembahasan program dalam musrenbang yaitu bidang fisik sarana dan prasarana, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan.

C. Informan

Informan adalah sejumlah orang yang dianggap mampu memberikan penjelasan terkait dengan apa yang ditanyakan. Informan dalam hal ini terdiri dari: Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Staf dan Tokoh masyarakat

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data kualitatif dengan sumber data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode pengamatan partisipatif dan metode dokumentasi.

F. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Kesimpulan/Verification

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1. Proses

Fokus pertama dalam penelitian ini adalah mengenai Proses adalah tahapan-tahapan atau urutan pelaksanaan yang saling terkait untuk mengubah masukan menjadi keluaran, dimana sub yang menjadi focus penelitian pada bagian ini terdiri dari:

a. Proses pada Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Proses pelaksanaan program hasil musrenbang pada Bidang Fisik Sarana dan Prasarana tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kelurahan, telah disepakati beberapa program pada bidang sarana prasarana fisik, namun sebagian dari usulan tersebut ada yang tidak terakomodir pada musrenbang tingkat distrik, sehingga pada prosesnya program yang

dilaksanakan sesuai dengan daftar program yang diakomodir sampai pada musrenbang tingkat kota seperti pengadaan alat kantor, perbaiakn pagar kantor dan sebagian meubel pada kantor kelurahan. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selaniutnya peneliti melakukan iuga wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Pelaksanaan program hasil musrenbang bidang sarana prasarana fisik yang lolos dalam pengajuan, masih ada yang pada akhirnya ditangguhkan pada tahun berikutnya, seperti program perbaikan jalan antar wilayah tingkat RW karena selain besaran dana yang dibutuhkan tidak sesuai sehingga tidak ada pihak ketiga yang bersedia melaksanakannya, juga dikarenakan pelaksanaannya yang mepet dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal sesuai dengan apa yang ditargetkan diawal program, sehingga dananya dialihkan keprogram lain yaitu menjadi program pengecatan batas jalan. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Sekretaris Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Proses pelaksanaan program hasil musrenbang dalam bidang sarana prasarana fisik secara umum berjalan baik dan sesuai rencana awal, namun ada valume kegiatan yang dikurangi karena pagu anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal seperti pengadaan meubel berupa meja kursi, dari 10 unit yang direncanakan, pada pelaksanannya hanya 7 unit meja kursi yang dapat direalisasikan, bahkan ada 1 program yang dialihkan karena ketidak sesuaian pagu anggarannya. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

b. Proses pada Bidang Sosial Budaya

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan transpsransi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Proses pada program dari musrenbang bidang social budaya ada beberapa yang lolos sampai pada tahap musrenbamg tingkat kota diantaranya adalah bantuan pengadaan alqurán, infokus bagi gereja, bantuan social bagi masyarakat miskin, pelatihan pemanfatan halaman dengan tanaman hidroponik. Dimana prosesnya dilakukan oleh pihak pendamping berupa pengadaan ayat suci dan infokus, untuk bantuan social prosesnya dilaksanaakn langsung oleh aparatur kelurahan yang ditugaskan oleh lurah, sementara program pelatihan dilaksanakan oleh

pihak ketiga yang ditetapkan oleh pihak kelurahan. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Proses hasil musrenbang pada bidang social yang telah selesai dilaksanakan adalah pengadaan Algurán untuk Mesjid dan pemberian infokus untuk posyandu. gereja, pengkaderan pelatihan pengolahan makanan dari bahan sagu, dimana prosesnya dipesankan dan setelah tiba di kantor kelurahan, langsung diserahkan pada pihak masjid dan gereja sementara untuk pelatihan pemanfatan halaman dengan tanaman hidroponik belum dilaksanakan, masih pada tahap pendataan peserta. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Proses pelaksanaan program hasil musrenbang di kelurahan Trikora secara umum telah berjalan sesuai ketetapan, adapun program yang belum disetujui bukan karena ditolak tetapi lebih pada penundaan, karena pada masa pandemic saat ini, adanya pengalihan anggaran pada penanganan covid-19 sehingga program yang dipandang belum terlalu prioritas, untuk sementara waktu bias ditangguhkan, seperti pengaspalan jalan, pengadaan tong air bagi warga danlain-lain. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

c. Proses pada Bidang Ekonomi

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan transpsransi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Proses kegiatan Pemberian bantuan bagi masyarakat pelaku usaha kecil yaitu penjual kue, rori dan es, bantuan modal usaha bagi kelompok penjual pinang, bantuan modal usaha bagi kelompok penjual hasil perkebunan. Program tersebut sejauh ini belum dilaksanakan, karena pendataan yang dilakukan belum tuntas dan masih adanya masyarakat yang tahun lalu sudah memperoleh masih mengajukan sementara hal ini diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memperoleh pada tahun lalu. (Wawancara pada tanggal 16 Dseember 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: *Pada prosesnya pelaksanaan program ini adalah*

pada penentuan siapa saja yang bisa menerima bantuan tersebut, terutama bantuan modal usaha, jangan sampai terulang lagi pada tahun sebelumnya, dimana masyarakat yang sudah mendapat bantuan modal usaha tapi pada tahun berikutnya masih mendapatkan bantuan, sementara ada beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori penerima tetapi sampai saat ini belum memperoleh manfaat dari program tersebut. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Pada proses pelaksanaan bidang ini memang masih ada sedikit kendala berkaitan dengan penetapan atau sasaran program, dimana perlu diberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, khususnya yang pernah menerima bantuan modal usaha, agar mekanismenya diatur bahwa prioritas sasaran program pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan modal usaha atau system bergilir karena keterbatasan anggaran, sehingga pada prosesnya akan lebih tepat sasaran. (Wawancara pada tanggal 16 Dseember 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

d. Proses pada Bidang Pemerintahan

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan transpsransi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Kegiatan yang harus direalisasikan dan masuk pada program prioritas pada bidang ini diantaranya adalah Pendataan penduduk berbasis IT, pengadaan papan nama jalan, papan nama ketua RT dan RW serta pengadaan papan nama untuk batas wilayah antar RT dan RW. Pembangunan kantor kelurahan dan penyelesaian sertifikat dan penyelesaian pelepasan tanah. Proses kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim dari kelurahan yang ditugaskan langsung oleh Lurah dengan pendamping program sebagai perwakilan dari unsur eksternal kelurahan. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Pada bidang ini sebenarnya ada beberapa kegiatan yang cenderung berulang-ulang pada setiap tahunnya, seperti pengadaan papan nama jalan, papan nama ketu RT dan RW juga pengadaan papan batas wilayah RT dan RW, pada prosesnya perlu memperhatikan kualitas, terutama kualitas bahan agar tahan lama sehingga tidak perlu dianggarkan setiap tahun. (Wawancara pada

tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Program yang paling prioritas dan harus segera direalisasikan pada bidang pemerintahan adalah pendataan penduduk berbasis IT, karena program tersebut berpengaruh terhadap data perkembangan penduduk yang sangat pesat dan penentuan jumlah penduduk wajib e-KTP, sehubungan program wajib e-KTP dari tahun 2018 sampai sekarang belum tuntas. Pada prosesnya program ini akan dilaksanakan oleh tim dari kelurahan beserta pendamping dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jayapura. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

2. Keluaran

Fokus berikutnya dalam kajian ini adalah mengenai Keluaran adalah hasil yang dicapai melalui proses yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah bagaimana luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam penyusunan, dimana sub yang menjadi focus penelitian pada bagian ini terdiri dari

a. Keluaran Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Keluaran pada Bidang Fisik Sarana dan Prasarana tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Output yang diharapkan dari pelaksanaan program hasil musrenbang pada bidang sarana prasarana fisik diantaranya adalah dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimum bagi aparatur kelurahan dapat diharapkan lebih maksimal dalam memberikan pelayanannya, selain itu upaya penataan kantor kelurahan dapat lebih memotivasi pegawai agar kinerjanya lebih baik lagi.. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Realisasi program hasil musrenbang di Kelurahan Trikora bidang sarana prasarana fisik yaitu pengadaan meja kursi kantor pada masing-masing unit kerja yang ada, karena kondisi sarana tersebut sudah banyak yang rusak termasuk perangkat pelayanan berupa computer dan printer, dengan hal tersebut diharapkan mampu memenuhi khususnya kelengkapan sarana kebutuhan prasarana pendukung baik bagi aparatur kelurahan maupun bagi masyarakat, sehingga aktivitas pemerintahan berjalan baik dan sesuai

harapan dari semua pihak sebagai upaya perwujudan kehidupan yang lebih baik sesuai target dari pelaksanaan program tersebut. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Hasil yang dicapai pada pelaksanaan program hasil musrenbang diantaranya adalah tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora, sehingga dapat lebih memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju pada pelayanan prima sesuai apa yang diharapkan masyarakat. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

b. Keluaran Bidang Sosial Budaya

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Keluaran Bidang Sosial Budaya tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Berkaitan dengan output yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah terciptanya kehidupan social budaya yang baik sesuai dengan kearifan local yang ada dan meningkatnya potensi kehidupan masyarakat yang rukun dan bertoleransi tinggi antar warga dikelurahan Trikora (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

peneliti Selanjutnya juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Upaya memaksimalkan potensi wilayah dapat tercapai apabila didukung oleh factor social budaya yang baik seperti kehidupan antar umat beragama terjalin baik, kerukunan warga terjalin baik, budaya saling menghormati dan menghargai antar warga menjadi tolok ukur output dari kehidupan social budaya di wilayah kelurahan Trikora. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Luaran dari pelaksanaan program hasil musrenbang bidang social budaya secara umum bermuara pada visi dan misi kelurahan bidang kehidupan bermasyarakat dengan semangat dan jiwa gotong royong sebagai cerminan kehidupan yang baik, rukun dan tertib yang terbentuk atas kesadaran masing-masing individu. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

c. Keluaran Bidang Ekonomi

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Keluaran Bidang Ekonomi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program kerja hasil musrenbang di kelurahan Trikora khususnya pada bidang diantaranya adalah peningkatan keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan vang dimilikinya. vaitu memiliki aktivitas berdagang sesuai kemampuannya, sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan tercapai kehidupan masyarakat sejahtera sesuai tujuan utama pada kehidupan bernegara. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti melakukan juga wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Setiap program yang direncanakan tentu diukur terlebih dahulu dasar dari program tersebut diusulkan dan output yang diharapkan, termasuk dalam bidang ekonomi, hal tersebut sangat jelas bahwa tujuan utama jalannya pemerintahan adalah terbentuknya masyarakat sejahtera baik secara ekonomi, social, budaya dan bidang lainnya. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Output pelaksanaan program bidang ekonomi secara umum ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan ekonomi masyarakat, untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

d. Keluaran Bidang Pemerintahan

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Keluaran Bidang Pemerintahan tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Output yang diharapkan dalam pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan diantaranya tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparatur pemerintah kepada masyarakat selaku pengguna layanan. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Dengan adanya program kerja bidang pemerntahan, output yang dihasilkan adalah meningkatnya kinerja pegawai sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur kelurahan semakin tinggi dengan dukungan sarana prasarana yang memadai semangat kerja dari pegawai diharapkan lebih meningkat. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Program kerja bidang pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan good government dan clean government dengan penarapan prinsip-prinsipnya secara maksimal, ini merupakan tolok ukur utama dibentuknya organisasi pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan sebagai unsur pelaksana yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat pada wilayah kerja kelurahan. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

3. Dampak

Fokus terakhir dalam kajian ini adalah menganalisa Dampak dari pelaksanaan program hasil musrenbang tersebut yaitu melihat sejauhmana perubahan atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan, dimana sub yang menjadi focus penelitian pada bagian ini terdiri dari:

a. Dampak pada Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Dampak pada Bidang Fisik Sarana dan Prasarana tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Dampak dari pemenuhan kebutuhan sarana prasarana fisik yang tertuang dalam musrenbang tercapainya penataan kantor yang baik sebagai upaya peningkatan motivasi kerja pegawai, pemetaan wilayah yang baik dengan batas-batas wilayah yang jelas, jalan yang rapih karena pengecatan yang baik berkat gotong royong warga masyarakat . (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Dengan terlaksananya program ini maka capaian kelayakan minimal instansi kelurahan dapat tercapai dengan baik, dimana ketatalaksanaan pelayanan dapat sesuai dengan SOP yang ada serta alur birokrasi menjadi lebih jelas dengan penempatan sarana prasarana kerja yang baik.

(Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Dampak yang dirasakan dari pengadaan sarana prasarana fisik contohnya dari pengadaan papan batas wilayah antar RT atau RW dan papan nama ketua RT dan RW memudahkan masyarakat dalam melihat batas wilayah secara jelas juga mudah mengenal nama dan rumah ketua RT dan RW sehingga bila ada keperluan pengurusan suatu pelayanan dapat langsung dating ke rumahnya. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

b. Dampak pada Bidang Sosial Budaya

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Dampak pada Bidang Sosial Budaya tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Dampak dari pelaksanaan program kerja hasil musrenbang bidang social budaya terciptanya kehidupan yang rukun antar warga serta tatanan kemasyarakatan yang teratur dan terbinanya generasi muda kearah yang lebih positif dengan kehidupan beragama dengan toleransi yang tinggi. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Pembinaan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, dapat hidup rukun secara berdampingan dan saling menghargai satu sama lainnya. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Dikembangkannya program kerja bidang social budaya berdampak positif terhadap kepedulian antar masyarakat sebagai budaya masyarakat di wilayah kelurahan Trikora serta mencerminkan suasana kehidupan yang harmonis antar warga. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

c. Dampak pada Bidang Ekonomi

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Dampak pada Bidang Ekonomi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program bidang ekonomi yaitu meningkatnya perekonomian warga dengan menjalankan usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya sehingga

menjadi individu yang mandiri. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Outcome dari pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi kerakyatan adalah upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, dimana potensi dari masing-masing warga dapat berkembang terutama dalam ирауа menopang perekonomiannya. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Bahwa program kerja bidang ekonomi secara umum berdampak pada perwujudan masyarakat sejahtera, mandiri dan memiliki daya saing sehingga mampu berkompetisi dengan warga lainnya sesuai kemampuan masing-masing warga. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2021 di Kantor Kelurahan Trikora).

d. Dampak pada Bidang Pemerintahan

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kelurahan Trikora berkaitan dengan Dampak pada Bidang Pemerintahan tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut: Dampak dari pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan salah satunya adalah tercapaianya peningkatan tertib administrasi pada ketatalaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan dengan berbasis pada IT sesuai tuntutan pada era modern saat ini. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2020 di Kantor Kelurahan Trikora).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di kelurahan Trikora berkaitan dengan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut: Keberhasilan program yang dilaksanakan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan capaian indikator kinerjanya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2020 di Kantor Kelurahan Trikora).

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara tentang hal tersebut dengan informan lainnya yaitu Kasie Program Kelurahan Trikora, beliau mengatakan sebagai berikut: Dampak dari bidang ini adalah terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang tertib administrasi, birokrasi yang baik dan koordinasi yang terarah dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2020 di Kantor Kelurahan Trikora).

b. Pembahasan

Proses

Berkaitan dengan proses hasil musrenbang tingkat kelurahan, telah disepakati beberapa program pada bidang sarana prasarana fisik, namun sebagian dari usulan tersebut ada yang tidak terakomodir pada musrenbang tingkat distrik, sehingga pada prosesnya program dilaksanakan sesuai dengan daftar program yang diakomodir sampai pada musrenbang tingkat kota. Pelaksanaan program hasil musrenbang bidang sarana prasarana fisik yang lolos dalam pengajuan, masih ada yang pada akhirnya ditangguhkan pada tahun berikutnya, seperti program perbaikan jalan antar wilayah tingkat RW karena selain besaran dana yang dibutuhkan tidak sesuai sehingga tidak ada pihak ketiga yang bersedia melaksanakannya

Proses pelaksanaan program hasil musrenbang dalam bidang sarana prasarana fisik secara umum berjalan baik dan sesuai rencana awal, namun ada valume kegiatan yang dikurangi karena pagu anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal seperti pengadaan meubel berupa meja kursi, dari 10 unit yang direncanakan, pada pelaksanannya hanya 7 unit meja kursi yang dapat direalisasikan, bahkan ada 1 program yang dialihkan karena ketidak sesuaian pagu anggarannya. Realisasi program dari hasil musrenbang bidang social budaya ada beberapa yang lolos sampai pada tahap musrenbamg tingkat kota diantaranya adalah bantuan pengadaan alqurán, infokus bagi gereja, bantuan social bagi masyarakat miskin, pelatihan pemanfatan halaman dengan tanaman hidroponik, yang telah selesai dilaksanakan adalah pengadaan Alqurán untuk Mesjid dan pemberian infokus untuk gereja, pengkaderan posyandu, pelatihan pengolahan makanan dari bahan sagu, sementara untuk pelatihan pemanfatan halaman dengan tanaman hidroponik belum dilaksanakan.

Proses pelaksanaan program hasil musrenbang di kelurahan Trikora secara umum telah berjalan sesuai ketetapan, adapun program yang belum disetujui bukan karena ditolak tetapi lebih pada penundaan, karena pada masa pandemic saat ini, adanya pengalihan anggaran pada penanganan covid-19 sehingga program yang dipandang belum terlalu prioritas, untuk sementara waktu bias ditangguhkan. Pemberian bantuan bagi masyarakat pelaku usaha kecil sejauh ini belum dilaksanakan, karena pendataan yang dilakukan belum tuntas dan masih adanya masyarakat yang tahun lalu sudah memperoleh masih mengajukan sementara hal ini diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memperoleh pada tahun lalu. Pada prosesnya pelaksanaan program ini adalah pada penentuan siapa saja yang bisa menerima bantuan tersebut, terutama bantuan modal usaha, jangan sampai terulang lagi pada tahun sebelumnya, dimana masyarakat yang sudah mendapat bantuan modal usaha tapi pada tahun berikutnya masih mendapatkan bantuan, sementara ada beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori penerima tetapi sampai saat ini belum memperoleh manfaat dari program tersebut, perlu diberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, khususnya yang pernah menerima bantuan modal usaha, agar mekanismenya diatur bahwa prioritas sasaran program pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan modal usaha atau system bergilir

Kegiatan yang harus direalisasikan dan masuk pada program prioritas pada bidang ini diantaranya adalah Pendataan penduduk berbasis IT, pengadaan papan nama jalan, papan nama ketua RT dan RW serta pengadaan papan nama untuk batas wilayah antar RT dan RW. Pembangunan kantor kelurahan dan penyelesaian sertifikat dan penyelesaian pelepasan tanah, ada beberapa kegiatan yang cenderung berulang-ulang pada setiap tahunnya, seperti pengadaan papan nama jalan, papan nama ketu RT dan RW juga pengadaan papan batas wilayah RT dan RW, pada prosesnya perlu memperhatikan kualitas, terutama kualitas bahan agar tahan lama sehingga tidak perlu dianggarkan setiap tahun. Program yang paling prioritas dan segera direalisasikan pada pemerintahan adalah pendataan penduduk berbasis IT, karena program tersebut berpengaruh terhadap data perkembangan penduduk yang sangat pesat dan penentuan jumlah penduduk wajib e-KTP.

2. Keluaran (Output)

Output yang diharapkan dari pelaksanaan program hasil musrenbang pada bidang sarana prasarana fisik diantaranya adalah dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimum bagi aparatur kelurahan yang diharapkan dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanannya, mampu memenuhi kebutuhan khususnya kelengkapan sarana prasarana pendukung baik bagi aparatur kelurahan maupun bagi masyarakat, sehingga aktivitas pemerintahan berjalan baik dan sesuai harapan dari semua pihak. Pada pelaksanaan program hasil musrenbang diantaranya adalah tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora, sehingga dapat lebih memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju pada pelayanan prima sesuai apa yang diharapkan masyarakat

Luaran pelaksanaan program hasil musrenbang di kelurahan Trikora secara khusus pada bidang social budaya yaitu terciptanya kehidupan social budaya yang baik sesuai dengan kearifan local yang ada dan meningkatnya potensi kehidupan masyarakat yang rukun dan bertoleransi tinggi antar warga, budaya saling menghormati dan menghargai antar warga menjadi tolok ukur output dari kehidupan social budaya, secara umum

bermuara pada visi dan misi kelurahan bidang kehidupan bermasyarakat dengan semangat dan jiwa gotong royong sebagai cerminan kehidupan yang baik.

Luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program kerja hasil musrenbang di kelurahan khususnya pada bidang diantaranya adalah bagaimana masyarakat dapat diberdayakan sesuai dengan potensi kemampuan yang dimilikinya, sehingga menjadi masyarakat yang mandiri, bahwa tujuan utama jalannya pemerintahan adalah terbentuknya masyarakat sejahtera baik secara ekonomi, social, budaya dan bidang lainnya. Output pelaksanaan program bidang ekonomi secara umum ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pola pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan ekonomi masyarakat, mendukung keberlanjutan ekonomi untuk masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Output yang diharapkan dari pelaksanaan program kerja hasil musrenbang pemerintahan, yaitu diantaranya tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparatur pemerintah kepada masyarakat selaku pengguna layanan, meningkatnya kinerja pegawai sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur kelurahan semakin tinggi dengan dukungan sarana prasarana yang memadai. Program kerja bidang pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan good government dan clean government dengan penarapan prinsip-prinsipnya secara maksimal, ini merupakan tolok ukur utama dibentuknya organisasi pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan.

Dampak

Dampak dari pelaksanaan program kerja hasil musrenbang khususnya pada bidang sarana prasarana fisik dimana tercapainya penataan kantor yang baik sebagai upaya peningkatan motivasi kerja pegawai, pemetaan wilayah yang baik dengan wilayah yang batas-batas jelas, dimana ketatalaksanaan pelayanan dapat sesuai dengan SOP yang ada serta alur birokrasi menjadi lebih jelas dengan penempatan sarana prasarana kerja yang baik, contohnya dari pengadaan papan batas wilayah antar RT atau RW dan papan nama ketua RT dan RW memudahkan masyarakat dalam melihat batas wilayah secara jelas juga mudah mengenal nama dan rumah ketua RT dan RW.

Dampak dari pelaksanaan program kerja hasil musrenbang bidang social budaya terciptanya kehidupan yang rukun antar warga serta tatanan kemasyarakatan yang teratur dan terbinanya generasi muda kearah yang lebih positif, masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, dapat hidup rukun secara berdampingan dan saling menghargai satu sama lainnya dan kepedulian antar masyarakat sebagai budaya masyarakat di wilayah kelurahan Trikora serta mencerminkan suasana kehidupan yang harmonis antar warga.

Dampak dari pelaksanaan program bidang ekonomi sebagai hasil musrenbang bahwa meningkatnya perekonomian warga dengan menjalankan usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dimana potensi dari masing-masing warga dapat berkembang terutama dalam upaya menopang kebutuhan perekonomiannya dan perwujudan masyarakat sejahtera, mandiri dan memiliki daya saing sehingga mampu berkompetisi dengan warga lainnya sesuai kemampuan masingmasing warga.

Dampak dari pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan diantaranya tercapaianya peningkatan tertib administrasi pada ketatalaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan dengan berbasis pada IT, peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan capaian indikator kinerjanya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, birokrasi yang baik dan koordinasi yang terarah dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

V. KESIMPULAN

- 1. Proses hasil musrenbang pada Bidang Sarana dan Prasarana Fisik diantaranya pengadaan meubel berupa meja kursi untuk pegawai, pengecatan pagar kantor kelurahan, pengecatan jalan, pemasangan papan nama ketua RT dan RW serta pemasangan batas wilayah antar RT dan RW; pada Bidang Sosial Budaya adalah pengadaan Alquran untuk masjid, Infokus untuk gereja dan berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat, pada Bidang Ekonomi adalah bantuan modal usaha, bantuan sosial Dan pada Bidang Pemerintahan pendataan warga berbasis IT, penertiban administrasi dan penyelesaian sertifikasi kantor kelurahan.
- 2. Keluaran pelaksanaan program hasil musrenbang Bidang Sarana dan Prasarana fisik adalah upaya pencapaian standar pelayanan minimum bagi aparatur kelurahan, tercapainya penataan sarana prasarana fisik yang baik pada kantor kelurahan Trikora. Bidang Sosial Budaya terciptanya kehidupan social budaya yang baik sesuai dengan kearifan local, kehidupan masyarakat yang rukun dan bertoleransi tinggi antar warga. Bidang Ekonomi terbentuknya masyarakat sejahtera, tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing. Bidang Pemerintahan tertib administrasi dan pencapaian standar pelayanan prima dari aparatur pemerintah kepada masyarakat, meningkatnya kinerja

- pegawai sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur, mewujudkan good government dan clean government.
- 3. Dampak dari pelaksanaan program hasil musrenbang bidang Sarana Prasarana Fisik tercapainya penataan kantor yang baik sebagai upava peningkatan motivasi kerja pegawai, pemetaan wilayah yang baik dengan batas-batas wilayah yang jelas, dimana ketatalaksanaan pelayanan dapat sesuai dengan SOP yang ada serta alur birokrasi menjadi lebih jelas dengan penempatan sarana prasarana kerja yang baik. Bidang Sosial Budayaterciptanya kehidupan yang rukun antar warga serta tatanan kemasyarakatan yang teratur dan terbinanya generasi muda kearah yang lebih positif, mencerminkan kehidupan suasana harmonis antar warga. Bidang Ekonomi peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perwujudan masyarakat sejahtera, mandiri dan memiliki daya saing sehingga mampu berkompetisi dengan warga lainnya sesuai kemampuan masing-masing warga. Bidang Pemerintahan tercapaianya peningkatan tertib administrasi pada ketatalaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan dengan berbasis pada IT, peningkatan kineria pegawai serta peningkatan capaian indikator kinerianya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, birokrasi yang baik dan koordinasi yang terarah dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari Formula Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Andi Prastowo, 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cetakan kedua, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabetha
- Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik*. Pt. Buku Kita, Jakarta
- J.E Hosio, 2007, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Laksbang Jogjakarta
- Khoiruddin, 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Cetakan I, Averroes Press: Malang Mazmanian, Paul and Sabatier, 1983. Implementation And Public Policy, Scoot Foresman And Company, USA

- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabetha
- Sugiyono, 2014. Statistika untuk Penelitian, Alfabetha . Bandung
- Suharno, 2008, Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik. UNY. Press Jogjakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : PT Gunung Agung
- Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Sinar Grafika: Jakarta 1999
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Buku Kita
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022
- Petunjuk Teknis pelaksananaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Distrik Dan Kelurahan Tahun Anggaran 2021.
- Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Damayanti Devi (2019), Implementasi Kebijakan Aplikasi Electronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- Farid Moh dan Fithriana Noora (2016), Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sumenep.
- Erwinsyah Putra Nasution (2010), Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Medan Area Kota Medan.
- Utin Sri Ayu Supadmi (2011), Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
- Adam Aditia (2020), Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.